

Peran Financial Technology (*Fintech*) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Mochammad Fajar^{1,a)}; Cintia Widya Larasati^{2,b)}

^{1,2}Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Pamulang, Kampus Unpam Viktor
Jl. Puspitek Raya, Tangerang Selatan 15310, Indonesia

E-mail: ^{a)}corresponding author: fajar110@gmail.com

^{b)}cintia.widya0203@gmail.com

Abstrak: Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor industri. Pengembangan potensi ekonomi secara strategis perlu dilakukan, salah satunya dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi dinamika perkembangan bisnis dewasa ini adalah *Financial Technology* (Fintech). Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Fintech dalam perkembangan UMKM di Indonesia disertai penjelasan mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan melalui kajian dan analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur melalui berbagai jurnal penelitian, artikel, serta data sekunder. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan Fintech terhadap perkembangan UMKM dengan mengambil bahasan dari beberapa studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Adapun penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan.

Keywords: Fintech, UMKM, Peluang dan Tantangan

Abstract: The free trade of the ASEAN Economic Community (AEC) accompanied by the rapid development of technology and information has brought significant changes in various industrial sectors. Strategic economic potential development needs to be carried out, one of which is by strengthening the micro, small and medium enterprise (MSME) sector. Utilization of technology can provide many convenience facilities in every business activity with quick access. One of the technological developments that have become the dynamics of business development today is *Financial Technology* (Fintech). This paper aims to describe the role of Fintech in the development of MSMEs in Indonesia along with an explanation of the opportunities and challenges faced. This research was conducted through a qualitative descriptive study and analysis, where data were obtained from various reference sources regarding the topics and problems discussed. The data

collection technique used a literature study approach through various research journals, articles, and secondary data. This study explains how the application of Fintech to the development of MSMEs by taking the discussion from several case studies. The results of the study show that Fintech has considerable potential for the development of MSMEs in Indonesia. Fintech can assist MSME actors in providing convenience and efficiency in terms of technology-based financial management including digitizing financial reports, payment technology and online-based loans. The implementation of Fintech in MSMEs also has several challenges including infrastructure, legislation, limited human resource capabilities, and lack of financial literacy.

Keywords: Fintech, MSMEs, Opportunities and Challenges

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2015 telah berlaku adanya perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN atau pasar bebas Asia Tenggara. Sistem MEA menyebabkan hilangnya biaya bea cukai sehingga barang-barang dari negara ASEAN bebas masuk ke Indonesia untuk diperjualbelikan. Tidak hanya barang-barang yang masuk dari luar negeri akan tetapi tenaga kerja baik profesional maupun tidak profesional dapat secara bebas masuk ke Indonesia. Dengan adanya MEA dapat menjadi sebuah ancaman ataupun peluang terhadap pengusaha Indonesia dan hal tersebut tergantung dari kesiapan para pengusaha itu sendiri dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan [1].

Salah satu cara untuk merebut pasar ASEAN adalah dengan merebut pasar domestik. Beberapa hal yang dilakukan antara lain memperketat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga produk barang atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar bebas dan juga mempercepat pembangunan nasional [2,3]. Sejak tahun 2011, pemerintah telah membuat kebijakan terkait percepatan pembangunan nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Fokus kegiatan MP3EI adalah (1) penguatan konektivitas nasional yaitu pengintegrasian sistem logistik nasional (Sislognas), sistem transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah dan teknologi informasi dan komunikasi, (2) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional, serta (3) pengembangan potensi ekonomi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan klaster ekonomi dan kawasan ekonomi khusus [2].

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi salah satu caranya adalah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UMKM paling banyak yaitu sekitar 56,54 - 62,92 juta unit [4-6]. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2014 sebesar 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 99,6% dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7%. Sedangkan, menurut data dari Asian Development Bank (ADB) institute tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki kontribusi terbanyak dari *Small Medium Enterprise* (SME) atau UKM terhadap PDB sebesar 57,8%, penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2% dan total ekspor sebesar 15,8%. Akan tetapi sektor UMKM ini masih memiliki banyak persoalan. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha termasuk pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, penguasaan teknologi yang rendah serta lemahnya akses ke lembaga keuangan khususnya perbankan [7-9].

UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing

produknya. Sejalan dengan hal ini, teknologi di bidang keuangan atau diistilahkan dengan financial technology (Fintech) juga mengalami perkembangan yang pesat. Fintech dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM pada umumnya memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Melalui layanan Fintech, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi baik di area keuangan maupun pemasaran.

Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk memaparkan peranan *financial technology* (Fintech) dalam perkembangan UMKM di Indonesia disertai penjelasan mengenai peluang serta tantangan Fintech itu sendiri dalam pengembangan usahanya. Penelitian dilakukan melalui kajian dan analisis dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian termasuk dalam jenis kualitatif sedangkan jenis penulisan yang digunakan yakni deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai jurnal penelitian, artikel, serta data sekunder.

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 [10] yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UMKM paling banyak. Perkembangan UMKM di Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,32% yaitu dari sejumlah 59,2 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 64,19 juta unit di tahun 2019. Produktivitas UMKM per unit usaha juga mengalami peningkatan dari 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi 89,12 juta pada tahun 2019.

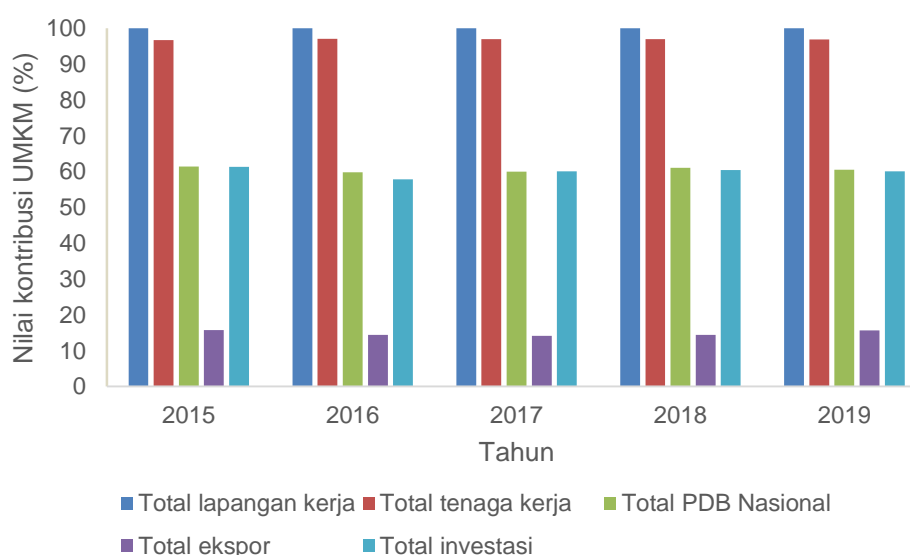
Tabel 1. Perkembangan UMKM Indonesia Periode Tahun 2015-2019

Indikator	2015 – 2016	2016 – 2017	2017 – 2018	2018 – 2019
Jumlah UMKM (Unit)	59.262.772	61.651.177	62.922.617	64.194.057

Tenaga Kerja (Orang)	123.229.387	112.828.610	116.431.224	116.978.631
PDB Konstan (Rp Triliun)	1.655.430	5.171.063	5.445.564	5.721.148
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	6.228.285	7.009.283	7.820.282	9.062.581
Ekspor Non-Migas (Rp Triliun)	185.975	255.126	301.629	293.840
Investasi Harga Berlaku (Rp Triliun)	1.818.749	2.057.972	2.377.412	2.564.549
Produktivitas UMKM per unit usaha (Unit)	27.933.725	83.876.144	86.543.826	89.122.705
Produktivitas UMKM per tenaga kerja (Unit)	13.433.727	45.831.133	46.770.650	48.907.633

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021 [11]

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM juga dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia serta dapat meringankan tugas negara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai pendapatan perkapita daerah hingga personal. Maka pada akhirnya, sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia [12]. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 [11], UMKM berkontribusi pada stabilitas perekonomian Indonesia dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan nilai ekspor non-migas dan penciptaan modal tetap atau investasi. Adapun nilai persentase kontribusi UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1. Nilai rata-rata selama lima tahun menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi sebesar 99,99% dalam penciptaan lapangan pekerjaan, 96,94% dalam penyerapan tenaga kerja, 60,57% dalam pembentukan PDB, 14,86% untuk ekspor non-migas dan 59,94% untuk penciptaan modal tetap atau investasi.



Gambar 1. Kontribusi UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia periode tahun 2015 – 2019

Permasalahan atau Kendala UMKM

Dari data yang telah dikemukakan, UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak permasalahan krusial yang dihadapi oleh UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1) Permodalan

UMKM masih menghadapi kendala dalam penambahan modal kerja baik untuk pembiayaan atau pendanaan maupun untuk investasi. Pemerintah telah mewajibkan kepada pihak bank untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu permodalan. Akan tetapi plafon KUR Mikro yang diberikan masih sangat rendah yaitu maksimal Rp 5 juta. Hal lain yang dikeluhkan UMKM saat pengajuan peminjaman selain dari keterbatasan plafon kredit adalah proses pengajuan yang cukup rumit dan jangka waktu pelunasan. Pihak perbankan juga sepertinya masih enggan memberikan kredit untuk UMKM. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karena kredibilitas usaha yang dimiliki UMKM kurang memadai. UMKM kurang mampu dalam membuat *business plan*, pembukuan, dan laporan keuangan. Sedangkan penyediaan laporan keuangan bagi usaha kecil diperlukan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal dari kreditur [13,14].

2) Kesulitan Pemasaran

Kesulitan dalam masalah permodalan membawa masalah selanjutnya yaitu kesulitan dalam pemasaran. Pengusaha kecil tidak dapat memasarkan produknya melalui media massa dengan jangkauan yang luas. Kurangnya media promosi menyebabkan penjualan berkurang [13,15].

3) Keterbatasan Sumber daya manusia

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam UMKM tercermin dalam ketidakmampuan dalam pembuatan laporan keuangan, pembukuan, media promosi, identitas usaha serta profil usaha yang relevan dengan era ekonomi digital saat ini. Hal mendasar yang tidak dimiliki UMKM inilah yang menyebabkan UMKM sangat rentan terhadap persaingan pasar bebas.

4) Keterbatasan Bahan Baku

Oleh karena keterbatasan modal, para pengusaha kecil sering mengalami kesulitan dalam perolehan bahan baku karena terbentur oleh sedikitnya penawaran (supplier terbatas) dan harga yang mahal. Masalah lain yang dihadapi selain keterbatasan bahan baku adalah perlengkapan produksi yang tidak lengkap menyebabkan jenis dan variasi produk yang dihasilkan statis sehingga sulit bersaing di pasar [13].

5) Pengelolaan Keuangan

Oleh karena kemampuan SDM yang terbatas, sebagian besar UMKM belum melakukan pembuatan laporan keuangan secara rinci. Pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual, pembukuan dan pencatatan belum memadai. Perusahaan belum melakukan pelaporan keuangan dan tidak semua transaksi penjualan dan pembelian dibuatkan nota [8]. Laporan keuangan tidak hanya diperlukan untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur tetapi juga digunakan untuk mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya, pengendalian aset, kewajiban serta modal, dan penentuan pajak yang harus dibayar. Hal-hal tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan [8,16].

6) Penggunaan teknologi

Keterbatasan SDM juga memengaruhi UMKM dalam pemanfaatan teknologi yang ada baik untuk akses terhadap jasa keuangan, pengelolaan keuangan maupun sarana promosi.

Menurut Slamet dkk. [4] berdasarkan keterlibatannya secara digital, UKM dapat dikategorikan menjadi:

- a. Bisnis offline yaitu bisnis yang tidak memiliki akses internet.
- b. Bisnis online dasar yaitu bisnis yang memiliki akses internet tetapi tidak terhubung ke media sosial atau website.
- c. Bisnis online menengah yaitu bisnis yang memiliki akses internet dan juga aktif dalam media sosial dengan mengintegrasikannya ke dalam website.
- d. Bisnis online lanjutan yaitu bisnis yang memiliki akses internet, integrasi jejaring sosial dan kapabilitas *e-commerce*.

Proporsi UMKM tercatat 99,99% unit usaha dari total unit usaha di Indonesia. Lebih dari sepertiga (36%) UMKM di Indonesia masih offline, sepertiga lainnya (37%) hanya memiliki kemampuan online yang sangat dasar dengan terhubung ke internet melalui komputer atau smartphone, sekitar 18% memiliki kemampuan online menengah dengan menggunakan web atau medsos, dan hanya sekitar 9% saja yang memiliki kemampuan bisnis online dengan kemampuan *e-commerce* [5].

Financial Technology (Fintech)

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial dan dapat diartikan sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Definisi Fintech yang dijabarkan oleh Bank Indonesia adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech memberikan kemudahan dalam menggunakan dan memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, meliputi pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan Fintech dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus tatap muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, memilih dan mengetahui produk keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan, melakukan investasi secara mudah, serta memperoleh konsultasi terkait perencanaan keuangan. Fintech juga berperan penting dalam membantu lembaga keuangan untuk melakukan penilaian atau pemeringkatan kredit serta proses mengenal konsumen secara elektronik sehingga memungkinkan UMKM dalam memperoleh pinjaman atau layanan keuangan lainnya [17].

Aktivitas Fintech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan menjadi [9,12,18]:

- 1) *Crowdfunding* dan *Peer to peer (P2P) lending*. *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan unit usaha atau proyek usaha yang melibatkan manusia secara luas. *P2P lending* adalah teknik memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis secara online.
- 2) *Market Aggregator* adalah mengumpulkan dan mengelola data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan.
- 3) *Risk and Investment Management* atau biasa yang disebut dengan risiko dan investasi manajemen dalam *financial technology* digunakan sebagai perencanaan dalam bentuk digital.
- 4) *Payment, Settlement, and Clearing* adalah sektor Fintech dengan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan atau lembaga Bank Indonesia.

Data jenis-jenis Fintech di Indonesia tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2. Kategori jenis Fintech pada tahun 2020 di dominasi oleh *Peer to peer (P2P) lending* sebanyak 158 entitas dengan persentase sebesar 44,63%, kemudian disusul oleh *Risk and Investment Management* sebanyak 123 entitas dengan persentase sebesar 34,75%. Adapun kategori

Payment, Settlement, and Clearing dan *Market Aggregator* berada di urutan terbawah berturut-turut sebanyak 37 entitas dan 36 entitas dengan persentase sebesar 10,45% dan 10,17%.

Tabel 2. Data Jenis-Jenis Fintech di Indonesia tahun 2020

Jenis Fintech	Jumlah Entitas	Persentase (%)
Peer to peer (P2P) lending	158	44,63
Market Aggregator	36	10,17
Risk and Investment Management	123	34,75
Payment, Settlement, and Clearing	37	10,45
Total	354	100

Sumber: Bank Indonesia dan OJK, 2020 [19-22]

Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM

Peran Fintech dalam perkembangan UMKM dapat dilihat dari beberapa studi kasus UMKM di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus pada Toko Bali Bagus

Studi kasus pada Toko Bali Bagus menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Lamikro dapat membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Mengengah). Fitur aplikasi Lamikro memiliki unsur, yaitu Entri Jurnal, Laba & Rugi dan Neraca. Aplikasi Lamikro ini dapat digunakan melalui smartphone android yang bertujuan untuk memudahkan pemilik usaha dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebelum menggunakan dan menerapkan aplikasi pada usaha ini belum memiliki pengelolaan keuangan yang teradministrasi dengan baik. Pertama, perusahaan ini masih melakukan pencatatan akuntansi secara sederhana, tidak semua transaksi penjualan dibuatkan nota penjualan sehingga bukti transaksi tidak tersipikan dengan baik. Kedua, pengelolaan keuangan di Toko Bali Bagus belum memisahkan antara keperluan usaha dan keperluan pribadi (rumah tangga). Ketiga, perusahaan tidak memiliki sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga pemilik perusahaan tidak dapat mengetahui besarnya laba.

Penerapan aplikasi Lamikro dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Mengetahui bagaimana kinerja usaha melalui penyusunan laporan laba-rugi sebagai evaluasi kinerja usaha dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini memperoleh perhitungan laba yang dihasilkan secara akurat dan efisien dari penyusunan laporan laba-rugi dengan menggunakan aplikasi Lamikro yang sudah sesuai SAK EMKM.
- 2) Mengetahui laporan posisi keuangan sehingga dapat mencerminkan keadaan usaha sebenarnya agar pemilik dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat.

Namun, penerapan aplikasi Lamikro juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Pemilik usaha belum memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup baik, sehingga mengalami sedikit kesulitan memilih akun mana yang akan digunakan pada saat entri jurnal.

- 2) Aplikasi Lamikro sudah menyediakan akun-akun bagi pengguna, namun tidak dapat di edit ataupun membuat akun baru sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 3) Jurnal yang sudah di entri tidak bisa di edit kembali, sehingga pada saat terjadi kesalahan pengguna harus menghapus jurnal sebelumnya terlebih dahulu, kemudian membuat jurnal baru untuk memperbaiki jurnal yang salah.
- 4) Penggunaan aplikasi Lamikro ini harus menggunakan sambungan internet sehingga jika pengguna tidak memiliki sambungan internet maka aplikasi ini tidak dapat digunakan.
- 5) Pengunduhan laporan keuangan dalam bentuk pdf sulit dilakukan melalui smartphone sehingga harus melalui versi web.

Studi Kasus pada Alfin Souvenir Lumajang

Studi kasus pada Alfin Souvenir Lumajang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi akuntansi Si Apik berbasis android dapat membantu memenuhi kebutuhan sistem informasi akuntansi pada perusahaan serta dapat membenahi kelemahan sistem yang lama. Aplikasi Si Apik membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi serta membuat pelaporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebelum menggunakan dan menerapkan aplikasi pada perusahaan, sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi di Alfin Souvenir masih memiliki kelemahan. Terdapat beberapa kekurangan pada sistem lama seperti, belum adanya pengelolaan keuangan yang baik, pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual, pembukuan dan pencatatan belum memadai. pembukuan dan pencatatan akuntansi yang dilakukan secara manual terkadang pemilik usaha tidak mencatatnya dengan rinci dan seringkali lupa karena tidak begitu praktis. Perusahaan juga belum melakukan pelaporan keuangan dan tidak semua transaksi penjualan atau pembelian dibuatkan nota. Serta dalam pengelolaan keuangan Alfin Souvenir belum bisa memisahkan antara keperluan usaha keperluan pribadi.

Pada fitur aplikasi Si Apik mempunyai unsur sistem akuntansi seperti, jurnal, buku besar dan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi. Selain itu, aplikasi Si Apik juga membantu manajemen perusahaan dalam mengumpulkan informasi mengenai siklus penerimaan dan siklus pengeluaran yang ada di perusahaan dengan pemanfaatan penggunaan perangkat lunak berbasis android didasarkan atas penggunaan teknologi ponsel pintar yang mudah dan praktis. Diharapkan hal ini dapat membantu pelaku usaha Alfin Souvenir untuk mengelola keuangannya lebih praktis.

Penerapan aplikasi Si Apik dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu (1) melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan akuntansi dengan mudah kapan saja dan dimana saja, (2) mengetahui laba atau rugi perusahaan, serta (3) melakukan pengarsipan transaksi.

Namun, penerapan aplikasi Si Apik juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Dalam melakukan pencatatan transaksi pengguna harus menginput data berkaitan dengan informasi yang mendukung transaksi terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan transaksi yang mengakibatkan ketidakpraktisan, penginputan satu jenis barang dalam satu transaksi penjualan saja.
2. Kurangnya fitur dari aplikasi yang membuat perusahaan membutuhkan data di luar aplikasi.
3. Database pada Si Apik tidak bisa dipindahkan, jika pemilik perusahaan mengganti smartphonenya.

Studi Kasus pada Usaha Kecil Kuliner Kota Denpasar

Studi Kasus pada usaha kecil kuliner di Kota Denpasar menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan oleh usaha kecil untuk mempermudah pembayaran pajak secara online sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Penerapan digitalisasi keuangan dapat memberikan kemudahan bagi pemilik usaha, karena dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan perhitungan, kerusakan atau kehilangan

dokumen keuangan, mempercepat waktu penyusunan dan mengevaluasi hasil keuangan usaha dimanapun berada. Pemilik usaha tidak diharuskan memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dalam penggunaan aplikasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar usaha kecil belum menerapkan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Sebagian besar usaha kecil di Kota Denpasar yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar belum menerapkan digitalisasi laporan keuangan untuk usahanya. Tiga (3) dari Enam (6) usaha kecil yang menjadi sampel penelitian sudah menggunakan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangannya, akan tetapi tidak menggunakan bantuan rumus – rumus yang tersedia dalam aplikasi tersebut, sehingga proses penyusunannya bisa dikatakan masih secara manual. Dengan kata lain, sebagian besar usaha kecil bidang kuliner di Kota Denpasar belum menerapkan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan usahanya.

Penggunaan aplikasi Zahir Accounting ini memudahkan pemilik usaha dalam penyusunan laporan keuangannya, karena pemilik tidak dituntut untuk mengetahui tata cara penyusunan laporan keuangan dengan benar. Penerapan digitalisasi ini juga memudahkan pemilik dalam mengevaluasi laporan keuangannya dimana pun berada karena hasil laporan keuangan bisa disimpan pada smartphone, sehingga pemilik bisa mengambil keputusan dari hasil evaluasi laporan keuangan dimana saja tanpa dibatasi ruang. Sementara, penyusunan dengan Microsoft Office Excel, mengharuskan pemilik usaha untuk memiliki pengetahuan penyusunan laporan keuangan. Penggunaan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pemilik usaha belum bisa dikatakan sebagai penerapan digitalisasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel masih menggunakan cara manual, namun dengan menggunakan media elektronik bukan buku atau kertas seperti pada umumnya.

Penerapan digitalisasi laporan keuangan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Laporan keuangan dapat lebih transparan dan dikelola secara baik.
2. Penyimpanan laporan keuangan akan semakin efisien dan tersimpan lebih aman.
3. Memudahkan memonitor laporan keuangan.
4. Lebih hemat dan mudah dalam penyimpanan laporan keuangan.
5. Mempercepat dalam proses penemuan kembali berkas laporan keuangan.
6. Lebih mudah dalam penyebaran informasi laporan keuangan.

Studi Kasus pada UMKM di Kota Magelang

Studi kasus pada UMKM di Kota Magelang menunjukkan bahwa Fintech berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional, dan efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya, namun demikian penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri.

Perkembangan UMKM di Kota Magelang turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan Fintech, namun tidak seluruh dari UMKM yang ada memanfaatkan Fintech. Sebagian besar masih ragu dalam memanfaatkan Fintech sebagai sumber modal maupun untuk pembayarannya. Minimnya pengetahuan dari UMKM menjadikan Fintech di kota Magelang tidak memanfaatkannya. Dari 18 UMKM baru 27,8% yang menggunakan layanan Fintech, dan 80% menggunakan Fintech sebagai sarana pembayaran saja. Perlu dilakukannya sosialisasi Fintech terhadap UMKM di Kota Magelang guna mendorong perkembangan pada UMKM karena Fintech dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu (1) menyediakan pasar untuk UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasaran mereka, (2) menjadi alat pembayaran dan penyelesaian/kliring, (3) membantu implementasi investasi yang lebih efisien, dan (4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional.

Penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri diantaranya yaitu (1) masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Fintech, (2) rendahnya SDM, dan (3)

rendahnya kapasitas jaringan internet yang memadai di Kota Magelang atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet.

Peluang Fintech dalam Perkembangan UMKM

Fintech (*Financial Technology*) dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya UMKM memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya Fintech maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan [18]. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan dan adanya Fintech dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online ataupun smartphone [9,16].

Fintech memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan Fintech memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan Fintech dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yaitu sasaran terhadap masyarakat yang *unbankable*. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis Fintech [23]. Adanya perubahan pola pikir konsumen yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri Fintech untuk berkembang [18, 24].

Situasi pandemi covid juga semakin meningkatkan peluang Fintech untuk masuk ke dalam UMKM. Hal tersebut karena pada situasi pandemi berimbas pada melemahnya daya beli konsumen karena bertambahnya angka pengangguran akibat penutupan perusahaan. Selain itu konsumen merasa lebih aman melakukan pembelian dari rumah. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan penggunaan Fintech dalam upaya peningkatan penjualan [14].

Tantangan Fintech dalam Perkembangan UMKM

Tantangan Fintech dalam perkembangan UMKM meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya literasi keuangan [25]. Dalam hal infrastruktur, layanan Fintech berbasis aplikasi membutuhkan adanya jaringan internet. Keterbatasan jaringan internet yang memadai dapat mengganggu pelaksanaan semua transaksi keuangan yang dilakukan para UMKM [23]. Menurut Ningsih [18] bahwa saat jaringan internet tidak stabil maka pekerjaan dapat terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan.

Dalam hal perundang-undangan dan pengawasan OJK, pelaku industri Fintech perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan [15]. Edukasi Fintech merupakan bagian dari tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator [26]. Layanan keuangan digital Indonesia dilaksanakan dengan payung hukum Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUMBTI) sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri Fintech [12,27].

Dalam hal keterbatasan kemampuan SDM tercermin pada masih kurangnya literasi keuangan. Menurut survei OJK tahun 2013, penduduk Indonesia memiliki tingkatan literasi keuangan, yaitu:

- 1) *Well literate* (21.84%) adalah penduduk yang memiliki pengetahuan lembaga keuangan dan produk-produknya serta memiliki keterampilan menggunakan produk dan jasa keuangan.

- 2) *Sufficient literate* (75.69%) adalah penduduk yang memiliki pengetahuan lembaga keuangan dan produk-produknya.
- 3) *Less literate* (2.06%) adalah penduduk yang cenderung atau kurang memiliki pengetahuan lembaga jasa keuangan, produk serta jasa keuangan.
- 4) *Not literate* (0.41%) adalah penduduk yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan.

Salah satu ancaman yang terasa saat ini lewat maraknya Fintech pinjaman online atau *Peer to peer (P2P) lending* yang tak teregistrasi alias ilegal. Pinjaman online ilegal menjadi ancaman bagi masyarakat yang minim literasi keuangan dan digital karena bisa terjebak dalam pusaran hutang. Perlindungan terhadap pengguna Fintech belum maksimal sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan ketat untuk melindungi perusahaan Fintech dan terutama pelaku usaha UMKM sebagai nasabah [12].

Selain pengawasan dan edukasi yang dilakukan oleh OJK, pemerintah khususnya melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Bank Indonesia berkewajiban untuk menyediakan sistem aplikasi keuangan seperti Si Apik, Lamikro, atau Zahir Accounting dengan pengembangan aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM [7,8,16]. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha Fintech dapat menjadikan semua ancaman atau kendala tersebut menjadi sebuah peluang atau potensi. Banyak sekali potensi yang bisa digunakan oleh perusahaan Fintech supaya dapat bersinergi dengan industri keuangan lokal seperti BPD, BPR, koperasi dan lembaga keuangan mikro agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih mapan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang relatif lebih murah dan efisien [15].

KESIMPULAN

Fintech (*Financial Technology*) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Fintech juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang *unbankable* dengan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah.

Fintech juga menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi permasalahan infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Dalam hal infrastruktur, Fintech membutuhkan jaringan internet yang stabil dan memadai agar layanan dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal perundang-undangan, Fintech harus dapat memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Mengenai keterbatasan kemampuan SDM berhubungan dengan masih kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam Fintech ilegal sehingga perlindungan terhadap pengguna Fintech belum maksimal. Di samping itu, pemerintah perlu menyediakan sistem aplikasi keuangan dengan pengembangan aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadim, K., & Nardi Sunardi, S. (2018). Determinant Of Company's Likuidity And It's Implications On Financial's Performance Of Retail Trade Company's In Indonesia At The Period Of 2008–2017. *Global and Stockhastic Analysis*, 5(7), 235-247.
- Abdul Kadim, K., & Nardi Sunardi, S. (2018). Determinant Of Company's Likuidity And It's Implications On Financial's Performance Of Retail Trade Company's In Indonesia At The Period Of 2008–2017. *Global and Stockhastic Analysis*, 5(7), 235-247.

- Abdul Kadim, K., & Nardi, S. (2018). Eviews Analysis: Determinant Of Leverage And Company's Performance. *Global and Stochastic Analysis (GSA)*, 5(7), 249-260.
- Abdul Kadim, K., & Nardi, S. (2018). Eviews Analysis: Determinant Of Leverage And Company's Performance. *Global and Stochastic Analysis (GSA)*, 5(7), 249-260.
- Abdul Kadim, K., Nardi Sunardi, S., Hendro Waryanto, W., Dessy Adelin, A., & Endang Kusmana, K. (2018). The Effects Of Bank Soundness With The RGEC Approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Of Leverage And Its Implications On Company's Value Of State Bank In Indonesia For The Period Of 2012-2016. *IJER (International Journal of Economic Research)*, 15(11), 41-52.
- Adenia, Q. S., & Husaini, A. (2019). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Denpasar). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 72(2), 110–119.
- Asosiasi Fintech Indonesia. (2021). *Hand Book Fintech Untuk UMKM*.
- Dalimunthe, M. I. F. (2019). Implementasi Fintech Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Firdausy, C. M. (2018). Industri Kreatif, Instrumen Keuangan dan UMKM dalam Era Ekonomi Digital. In C. M. Firdausy (Ed.), *Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital* (1st ed., pp. 1-8). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Firdausy, C. M. (2018). Strategi dan Kebijakan Ekonomi Pengembangan Industri Kreatif, Keuangan dan UMKM dalam Era Digital. In C. M. Firdausy (Ed.), *Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital* (1st ed., pp. 141-146). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. (2020). IKD Tercatat Klaster Aggregator. In *Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital per Agustus 2020* (pp. 4-5). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020.aspx>
- Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. *Man in India*, 97(24), pp. 131-148.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakarta. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana, E., Dewi, P. E. D. M., & Dewi, L. G. K. (2020). Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 179–186. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i2.281>
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Data UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id/dataumkm/?9Oqf4G4KtqzULmB7kFWnInjk5dPJGQPFe6lZCgkvMZFYCHWnNs>
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 19(1), 55–60

- Maulida, A. (2020). Fin-Tech UMKM untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi, STIE Mandala Jember*, 16(2), 326–337. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.367>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213
- Nardi Sunardi, E. A., Kadim, A., Tumanggor, M., & Oktrima, B. (2018). Effects Of The Bank Soundness With The Rbbr Approach (Risk Base Bank Rating) Of Cost Efficiency And Its Implications On Sharia Bank Performance In Indonesia For The Period Of 2012–2016. *International Journal of Economic Research*, 15(1).
- Ningsih, D. R. (2020). Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 270–277.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Data Perusahaan Efek per Agustus 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Pages/DataperusahaanEfekAgustus2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per Agustus 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-Agustus-2020.aspx>
- Rahardjo, B., Khairul, I., & Siharis, A. K. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 347–356.
- Sasongko, A. H. (2018). *MEA Peluang atau Ancaman*. <https://binus.ac.id/entrepreneur/2018/11/26/mea-peluang-atau-ancaman/>
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2016). Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2), 136–147. <https://doi.org/10.25124/jmi.v16i2.319>
- Sumiati. (2021). *Kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. <https://www.topbusiness.id/17046/kesiapan-indonesia-menghadapi-masyarakat-%0Aekonomi-asean.html>
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).
- Sunardi, N., Hamid, A. A., Lativa, A. K., & Tulus, N. (2018). Determinant Of Cost Efficiency And It's Implications For Companies Performance Incorporated In The Lq. 45 Index Listing In Idx For The Period of 2011-2016. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 16(1).
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Tahir, R. (2020). Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 18–28. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25060>
- Tedjasuksmana, B. (2020). Membangun Lingkungan Bisnis UMKM Dalam Pemanfaatan Digital Financial Technology. *PROSIDING Seminar Teknologi Kebumihan Dan Kelautan (SEMITAN II), Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)*, 387–390.

- Tim SBF Fastpay. (2020). Daftar 37 Uang Elektronik yang ada di Indonesia. <https://www.fastpay.co.id/blog/daftar-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Windayani, L. P., Herawati, N. T., & Sulindawati, L. G. E. (2018). Analisis Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android LAMIKRO Untuk Membantu Usaha Mikro Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM (Studi Pada Toko Bali Bagus). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(3), 50–62.
- Zahro, N. A., Indrianasari, N. T., & Yatminiwati, M. (2019). Analisis Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android Si Apik Untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil (Studi Kasus pada Alfin Souvenir Lumajang). *Progress Conference*, 2, 685–693.
- Zulyanto, A. (2016). Kesiapan Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Ekspansi*, 8(1), 29–45.